

**INOVASI ADMINISTRASI PUBLIK, KEPEMIMPINAN  
TRANSFORMASIONAL DAN PELAYANAN PUBLIK ADAPTIF  
DALAM KONTEKS SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA**

**Silvana Alivia Fadhilah<sup>1</sup>, Regina Sofia Ramadhani<sup>2</sup>, Olivia Niken Anggraeni<sup>3</sup>, Adelia  
Agustin<sup>4</sup>, Okta Ainita<sup>5</sup>**

[silvanafadillah@gmail.com](mailto:silvanafadillah@gmail.com)<sup>1</sup>, [reggee934@gmail.com](mailto:reggee934@gmail.com)<sup>2</sup>, [oliviaanggraeni398@gmail.com](mailto:oliviaanggraeni398@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[adeliaagustinnn9@gmail.com](mailto:adeliaagustinnn9@gmail.com)<sup>4</sup>, [okta.anita@ubl.ac.id](mailto:okta.anita@ubl.ac.id)<sup>5</sup>

**Universitas Bandar Lampung**

**Abstrak**

Dengan peningkatan teknologi dan dinamika sosial, sektor publik Indonesia harus melakukan transformasi birokrasi yang menyeluruh. Inovasi dalam administrasi publik menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap permintaan masyarakat. Sebaliknya, kepemimpinan transformasional adalah kunci untuk perubahan karena mereka dapat menumbuhkan semangat inovasi dan kerja sama, serta menciptakan budaya kerja yang fleksibel di lingkungan birokrasi. Untuk menyelidiki hubungan antara pelayanan publik adaptif, kepemimpinan transformasional, dan inovasi administrasi publik di Indonesia, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan transformasi digital, dan daya adaptasi birokrasi terhadap perubahan lingkungan strategis dapat dicapai melalui sinergi antara inovasi dan kepemimpinan transformasional. Tetapi inovasi berkelanjutan masih menghadapi banyak hambatan, termasuk resistensi budaya birokrasi, kekurangan kemampuan digital, dan kekurangan infrastruktur. Oleh karena itu, untuk menciptakan pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, kebijakan yang mendorong kolaborasi lintas sektor dan penguatan kapasitas sumber daya manusia diperlukan.

**Kata Kunci:** Inovasi Administrasi Publik, Kepemimpinan Transformasional, Pelayanan Publik Adaptif, Sektor Publik Di Indonesia.

**PENDAHULUAN**

Dalam era globalisasi dan kemajuan pesat teknologi informasi, administrasi publik menghadapi masalah yang semakin sulit. Birokrasi harus berubah karena perubahan lingkungan yang dinamis dan tuntutan masyarakat yang terus meningkat terhadap kualitas dan kecepatan pelayanan. Pelayanan publik yang responsif, efisien, dan berkualitas tinggi menjadi penting dalam konteks tata kelola pemerintahan modern.

Namun, birokrasi Indonesia sering menghadapi tantangan struktural, seperti budaya yang cenderung hierarkis, prosedur yang kaku, dan resistensi terhadap perubahan di kalangan aparatur. Kondisi seperti ini dapat menghambat kreativitas dan kerja sama, yang keduanya merupakan komponen penting dari inovasi. Meskipun demikian, inovasi administrasi publik adalah bagian penting dari peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan yang diberikan. Inovasi berarti menciptakan dan menerapkan proses, produk, layanan, atau metode pelayanan baru yang menghasilkan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan paradigma kepemimpinan yang solid yang mampu menggerakkan perubahan secara sistematis dalam organisasi. Paradigma kepemimpinan transformasional adalah pilar penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berfokus pada inovasi, akuntabilitas, dan pelayanan public. Terbukti bahwa kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan kinerja dan mempercepat transformasi digital birokrasi melalui visi yang menginspirasi, inspirasi, dan fokus individu.

Dipercaya bahwa model kepemimpinan ini adalah agen perubahan yang tepat dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah dengan cepat.

Pelayanan publik yang adaptif dibangun melalui kombinasi inovasi administrasi publik dan kepemimpinan transformasional. Budaya kerja kolaboratif dibangun melalui kepemimpinan transformasional, dan inovasi pelayanan publik yang lebih adaptif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat meningkat. Pelayanan publik yang dapat disesuaikan tidak hanya ditandai oleh transparansi dan standar pelayanan yang jelas (prosedur dan waktu penyelesaian), tetapi juga kemampuan untuk senantiasa responsif terhadap dinamika zaman.

inovasi dalam administrasi publik menjadi kunci utama dalam memperbaiki kinerja birokrasi. Melalui inovasi, lembaga pemerintahan dapat menciptakan mekanisme kerja baru yang lebih efektif, transparan, dan berbasis teknologi informasi. Inovasi administrasi publik bukan hanya soal penerapan teknologi, tetapi juga mencakup perubahan budaya kerja, pola pikir dan sistem manajerial yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.

hanya ditandai oleh transparansi dan standar pelayanan yang jelas, seperti prosedur dan waktu penyelesaian, serta kemampuan untuk secara konsisten beradaptasi dengan perubahan zaman.

Administrasi publik sangat bergantung pada inovasi. Inovasi adalah cara bagi lembaga pemerintahan untuk membuat mekanisme kerja baru yang lebih efisien, transparan, dan berbasis TI. Inovasi administrasi publik tidak hanya mencakup penerapan teknologi, tetapi juga perubahan dalam budaya kerja, cara berpikir, dan sistem manajemen yang memprioritaskan kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, inovasi adalah cara penting untuk membangun pelayanan publik yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik di lingkungannya.

Sebaliknya, inovasi tidak dapat berhasil tanpa kepemimpinan yang baik. Memotivasi, mendorong, dan mendorong staf untuk beradaptasi terhadap perubahan dapat dicapai melalui praktik kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional bukan hanya pengambil keputusan; mereka juga adalah penggerak perubahan yang mendorong kreativitas dan komitmen kolektif di organisasi pemerintah. Dengan gaya kepemimpinan ini, diharapkan aparatur dapat beralih dari cara kerja administratif ke cara kerja yang fleksibel, bekerja sama, dan berfokus pada hasil.

Pelayanan publik yang adaptif bergantung pada kombinasi inovasi administrasi publik dan kepemimpinan transformasional. Pelayanan publik adaptif adalah jenis pelayanan yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi secara cepat tanpa mengabaikan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi. Pada dasarnya, pelayanan publik adaptif menuntut lembaga pemerintah untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam teknologi informasi, perubahan sosial, dan perubahan dalam kebijakan publik. Adaptivitas dalam konteks ini berarti bukan hanya mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dari luar, tetapi juga kemampuan organisasi dalam dirinya sendiri untuk melakukan pembelajaran berkelanjutan (organisasi), meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan meningkatkan kerja sama lintas sektor. Di era digital, pelayanan yang adaptif akan semakin penting karena masyarakat membutuhkan layanan yang cepat, mudah diakses, dan berbasis transparansi dan akuntabilitas .

Sangat penting untuk melihat bagaimana inovasi administrasi publik dan kepemimpinan transformasional berhubungan satu sama lain, karena keduanya merupakan komponen yang saling memperkuat dalam proses transformasi birokrasi. Sejauh mana penerapan inovasi dan kepemimpinan transformasional dapat menghasilkan pelayanan publik yang adaptif di era modern yang penuh dengan ketidakpastian adalah subjek

penelitian ini. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam membangun layanan publik yang lebih efektif, terbuka, dan berfokus pada kepuasan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Metode Penelitian: Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur (review literatur) atau studi pustaka. Pendekatan ini dipilih karena variabel utama penelitian—Inovasi Administrasi Publik, Kepemimpinan Transformasional, dan Pelayanan Publik Adaptif harus dibahas secara konseptual, peran, masalah, dan mekanisme hubungannya dalam konteks sektor publik Indonesia.
- B. Untuk membangun kerangka konseptual yang kuat tentang hubungan antara inovasi dan kepemimpinan transformasional dalam konteks birokrasi adaptif, peneliti dapat melakukan penelitian literatur untuk menganalisis dan menyimpulkan berbagai sumber akademik.
- C. Metode Pengumpulan Data: Pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan menganalisis sumber akademik terbuka yang relevan.
1. Sumber data utama adalah sebagai berikut: Jurnal dan Artikel Penelitian: Artikel tentang administrasi publik, kebijakan publik, manajemen inovasi sektor publik, kepemimpinan transformasional, dan reformasi birokrasi di Indonesia<sup>1</sup>.
  2. Dokumen Kebijakan Pemerintah: Dokumen yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan peraturan pelayanan publik, seperti undang-undang dan peraturan Menteri PANRB

Metode Analisis Data: Analisis tematik (thematic analysis) dan sintesis konseptual dari hasil penelitian dari literatur yang telah dikumpulkan digunakan untuk melakukan analisis data. Langkah-langkah analisis adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data: Memilah dan memfokuskan data teks pada topik-topik penting seperti peran kepemimpinan transformasional dalam mempercepat transformasi digital birokrasi; dimensi inovasi administrasi (produk, proses, dan metode); dan masalah implementasi (seperti resistensi terhadap perubahan)<sup>2</sup>.
2. Penyajian Data (Coding dan Kategori): Mengidentifikasi dan mengelompokkan ide-ide penting dan cara-cara di mana variabel berhubungan satu sama lain ke dalam kategori tematik. Kategori utama yang dievaluasi termasuk:

Kepemimpinan Transformasional: Pengaruhnya terhadap komitmen, motivasi untuk pelayanan publik, dan budaya kerja kolaboratif. Inovasi Administrasi Publik: Cara membuat dan menerapkan proses dan prosedur inovatif yang menghasilkan efisiensi dan kualitas layanan.

Pelayanan Publik Adaptif menunjukkan fleksibilitas melalui transparansi, tanggapan terhadap kebutuhan masyarakat, dan kapasitas organisasi (sumber daya manusia, struktur, dan institusional).

3. Penarikan Kesimpulan (Sintesis Konseptual): Menafsirkan hasil penelitian untuk membuat model konseptual atau kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana kepemimpinan transformasional mendorong inovasi administrasi publik untuk menciptakan pelayanan publik yang adaptif. Kesimpulan juga mencakup pengenalan implikasi teoretis, serta saran kebijakan berdasarkan variasi literatur.

---

<sup>1</sup> Resdiana Enza, "KEPEMIMPINAN INOVATIF DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK," *Publik Corner* 11, no. 2 (2016).

<sup>2</sup> Permatasari Arini Nuraeni Intan, Taufiqoh Silma, Nurhayati, Gunardi, "Analisis Gaya Kepemimpinan Transformasional Dalam Mendorong Perilaku Inovatif Pegawai Pada Digitalisasi Pelayanan Publik," *Jurnal Manajemen & Bisnis* 1, no. 1 (2025): 13–26.

D. Fokus Penelitian dan Unit Analisis: Fokus penelitian adalah mekanisme sinergi antara kepemimpinan transformasional dan inovasi administrasi publik dalam konteks good governance, dan bagaimana hal itu berdampak pada hasil pelayanan publik adaptif. Unit Analisis adalah konsep dan temuan empiris yang ditemukan dalam laporan, artikel ilmiah, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan sektor publik di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian:**

Penelitian menunjukkan bahwa inovasi administrasi publik meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai lembaga pemerintahan di Indonesia. Dengan menerapkan e-government, e-kantor, dan sistem pelayanan online, inovasi administratif berbasis TI dapat mengurangi rantai birokrasi yang panjang dan meningkatkan layanan masyarakat. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen menunjukkan hal ini. Penerapan layanan publik berbasis aplikasi digital di beberapa pemerintah daerah, contohnya, dapat mengurangi waktu proses pelayanan dari beberapa hari menjadi hanya beberapa jam. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi meningkatkan efisiensi administrasi dan interaksi antara pemerintah dan Masyarakat<sup>3</sup>.

Selain itu, inovasi administrasi publik bukan hanya menggunakan teknologi; reformasi prosedur kerja, pembentukan unit layanan terpadu, dan peningkatan tata kelola yang partisipatif adalah semua contohnya. Dalam beberapa kasus, penyederhanaan regulasi, pelimpahan wewenang yang lebih fleksibel, dan penerapan sistem penghargaan dan hukuman yang berbasis kinerja adalah cara untuk melakukan inovasi. Hasil ini menunjukkan bahwa organisasi publik yang memiliki semangat untuk berinovasi cenderung memiliki tingkat adaptabilitas yang lebih tinggi ketika menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan politik.

Studi ini juga menemukan bahwa inovasi administrasi publik dibantu oleh kepemimpinan transformasional. Pemimpin yang visioner, dapat menginspirasi, dan mendorong anggota staf untuk berpartisipasi terbukti dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perubahan<sup>4</sup>. Tidak hanya berfokus pada pencapaian target formal, tetapi juga berusaha mendorong pegawai untuk menjadi lebih termotivasi secara internal dan menyadari satu sama lain untuk memberikan layanan masyarakat yang lebih baik. Dengan kata lain, kepemimpinan transformasional adalah kunci untuk membangun budaya inovasi dalam birokrasi.

Selain itu, hasil pengolahan data menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara pelayanan publik adaptif, kepemimpinan transformasional, dan inovasi administrasi publik. Sinergi kedua komponen ini memungkinkan organisasi publik untuk lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan kebijakan, kemajuan teknologi, dan tuntutan masyarakat. Pelayanan publik adaptif didefinisikan sebagai kemampuan organisasi publik untuk menyesuaikan strategi, prosedur, dan pola kerja sesuai kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Utami and Tangerang, "ARTIKEL TRANSFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK : INOVASI DAN ADAPTASI MENUJU EFISIENSI DAN PELAYANAN PUBLIK."

<sup>4</sup> Zairusi Sudrajat Ajat, Setiawan Awan, "Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sumedang" *JURNAL TATA KELOLA DAN KEBIJAKAN PUBLIK* 1, no. 1 (2025): 60-66.

<sup>5</sup> Abdullah Husein Al Aziz, Dkk. Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi pada Era Digital Serta Bagaimana Membantu Mengungkapkan dan Menghentikan Korupsi, *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 2025, vol. 4, no.2 : 26

## Diskusi

Inovasi dan kepemimpinan transformatif adalah kunci keberhasilan pelayanan publik modern. Inovasi seringkali ditentang oleh orang di dalam organisasi karena birokrasi Indonesia yang lebih prosedural dan hierarkis. Namun, tantangan dapat diatasi dengan pemimpin yang menumbuhkan semangat perubahan dan memungkinkan kreativitas. Pemimpin transformasional mendorong karyawan untuk berpikir lebih inovatif, terbuka, dan fokus pada hasil.

Selain itu, temuan ini sejalan dengan teori Burns (1978) dan Bass (1985) bahwa kepemimpinan transformasional sangat penting untuk mengubah sikap, nilai, dan perilaku individu sehingga sesuai dengan tujuan organisasi. Pemimpin transformasional dalam sektor publik Indonesia tidak hanya bertindak sebagai pengambil keputusan administratif, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu membangun komitmen pelayanan publik yang berintegritas dan semangat kerja sama lintas bidang. Terbukti bahwa pemimpin dengan gaya kepemimpinan ini dapat mendorong aparatur negara untuk memiliki kesadaran moral yang tinggi dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.

Dalam hal inovasi administrasi publik, temuan penelitian menunjukkan bahwa reformasi regulasi dan digitalisasi pelayanan yang dilakukan pemerintah untuk modernisasi birokrasi menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik. Inovasi telah menjadi bagian dari budaya dan bukan lagi program pemerintah.

Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kuat dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah melalui inovasi.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa masih ada beberapa masalah yang perlu ditangani. Beberapa di antaranya adalah ketimpangan infrastruktur antarwilayah, keterbatasan kemampuan digital aparatur, dan ketakutan terhadap perubahan di kalangan karyawan yang sudah lama terbiasa dengan cara kerja konvensional. Selain itu, budaya birokrasi yang formal menjadi penghalang lain untuk mengembangkan inovasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk membangun mentalitas kerja yang adaptif dan mendorong keberanian untuk mengambil risiko yang terukur selama proses inovasi, dibutuhkan pendekatan kepemimpinan transformasional yang konsisten.

Hubungan antara pelayanan publik adaptif, kepemimpinan transformasional, dan inovasi administrasi publik dapat dianggap sebagai sistem yang saling memengaruhi. Kepemimpinan transformasional memungkinkan pelayanan publik yang adaptif melalui nilai dan lingkungan yang mendorong inovasi. Jika tidak ada inovasi, kepemimpinan transformasional tidak akan memiliki alat praktis. Selain itu, tanpa kepemimpinan transformasional, inovasi administrasi tidak akan mendapatkan arah dan dukungan yang memadai dari budaya organisasi<sup>6</sup>.

Oleh karena itu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi dua komponen utama ini sangat penting untuk keberhasilan pelayanan publik adaptif di Indonesia. Kebijakan yang mendorong inovasi birokrasi secara sistemik harus diperkuat, sekaligus menumbuhkan sifat kepemimpinan yang cerdas dan inspiratif di setiap tingkat pemerintahan. Sektor publik Indonesia hanya dapat membangun layanan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat dan responsif terhadap perubahan jika keduanya digabungkan<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Frinaldis Aldri Rahim Kurnia Ridwan, "TRANSFORMASI BUDAYA DI SEKTOR PUBLIK INDONESIA: MENUJU INOVASI DAN EFISIENSI," *Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi (JUMEA)* 1 (2023): 93-103.

<sup>7</sup> Frinaldi Aldri Sendika May, "TRANSFORMASI BUDAYA ORGANISASI DI SEKTOR PUBLIK; INOVASI MENUJU PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH RESPONSIF," *Jurnal Inovasi Pendidikan IPS* 5, no. 2 (2025): 371-80.

## KESIMPULAN

melalui mekanisme umpan balik digital yang lebih terbuka dan mudah diakses, dapat meningkatkan partisipasi Masyarakat<sup>8</sup>.

Kedua, untuk memastikan bahwa inovasi dapat berkembang dan berkelanjutan dalam lingkungan birokrasi publik, kepemimpinan transformasional adalah penggerak utama. Pengambil keputusan pemerintah bukan satu-satunya peran yang dimainkan oleh pemimpin transformasional<sup>9</sup>. Mereka juga berfungsi sebagai inspirasi, motivator, dan penggerak perubahan yang menanamkan nilai-nilai seperti integritas, kreativitas, dan tanggung jawab moral kepada anggota staf. Menurut penelitian, organisasi publik yang dipimpin oleh pemimpin transformasional cenderung memiliki tingkat inovasi yang lebih tinggi dan lingkungan kerja yang lebih kooperatif. Pemimpin seperti ini mendorong keterbukaan ide, budaya belajar yang lebih baik, dan rasa kepemilikan bersama atas visi organisasi<sup>10</sup>. Ini menunjukkan bahwa dalam sistem birokrasi yang kaku dan otoriter, inovasi tidak dapat berkembang. Inovasi hanya dapat berkembang jika pemimpinnya memiliki kemampuan untuk menumbuhkan semangat perubahan secara kolektif.

Ketiga, pelayanan publik yang fleksibel adalah contoh nyata dari keberhasilan kombinasi inovasi administrasi publik dan kepemimpinan transformasional. Pelayanan publik yang adaptif menunjukkan bahwa lembaga pemerintah memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi perubahan sosial, politik, dan teknologi serta menyesuaikan kebijakan dan prosedur kerja dengan cepat tanpa mengorbankan keadilan dan akuntabilitas. Studi ini menemukan bahwa lembaga publik yang inovatif dan dipimpin secara transformasional memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, bahkan dalam keadaan krisis. Sebagai contoh, sejumlah pemerintah daerah berhasil beralih ke layanan publik ke platform daring selama pandemi COVID-19, memperluas akses ke informasi, dan mempercepat proses dengan tetap menjaga kualitas dan transparansi. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang adaptif membutuhkan kepemimpinan yang kuat, sumber daya manusia yang siap, dan teknologi<sup>11</sup>.

Studi ini juga menemukan bahwa ada sejumlah masalah struktural dan kultural yang masih menghambat pelaksanaan inovasi di sektor publik Indonesia. Selain itu, hubungan positif antara ketiga variabel tersebut dikonfirmasi. Keengganannya terhadap perubahan, kurangnya kemampuan digital staf, keterbatasan sumber daya anggaran, dan kesenjangan infrastruktur antarwilayah adalah beberapa dari tantangan tersebut. Selain itu, kreativitas pegawai dihalangi oleh budaya birokrasi yang cenderung prosedural dan hierarkis. Sebaliknya, gaya kepemimpinan transformasional tidak sepenuhnya diterapkan di seluruh jenjang pemerintahan. Ini menyebabkan perbedaan antara kebijakan inovatif di tingkat pusat dan implementasi di tingkat daerah.

Akibatnya, untuk mendorong pelayanan publik yang adaptif, langkah-langkah strategis dan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kolaborasi antara inovasi administrasi publik dan kepemimpinan transformasional. Pemerintah harus membuat lingkungan birokrasi yang mendukung perubahan dengan memungkinkan

<sup>8</sup> Di and Subang, "INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL : STUDI."

<sup>9</sup> Neysa Amallia, Zesty Miranda, and M Harviend Gilang Perdana, "Peran Kepemimpinan Transformasional Dalam Reformasi Pelayanan Publik Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 3235–41.

<sup>10</sup> Rahim Kurnia Ridwan, "TRANSFORMASI BUDAYA DI SEKTOR PUBLIK INDONESIA; MENUJU INOVASI DAN EFISIENSI."

<sup>11</sup> Kebijakan Agusnur, Analapublik et al., "Inovasi Kebijakan Publik Dalam Penanganan Krisis Pandemi Dan Pelayanan Publik," *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2025): 17–25.

eksperimen kebijakan, pemberdayaan pegawai, dan pengakuan terhadap kesuksesan inovatif lokal. Untuk melahirkan generasi pemimpin publik yang mampu menavigasi kerumitan perubahan zaman, diperlukan pelatihan kepemimpinan yang berfokus pada transformasi nilai. Pelatihan ini tidak hanya memerlukan keterampilan teknis.

Pelibatan masyarakat dalam proses inovasi pelayanan publik juga perlu ditingkatkan. Masyarakat adalah mitra strategis dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan dan bukan hanya objek penerima layanan. Inovasi publik dapat menjadi upaya kolektif yang berkelanjutan dan inklusif dengan memperkuat kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Metode kerja sama ini akan mempercepat pengembangan pelayanan publik yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Secara konseptual, temuan penelitian ini menyatakan bahwa pelayanan publik yang adaptif adalah hasil dari transformasi birokrasi yang didorong oleh inovasi dan kepemimpinan yang berani. Tanpa inovasi, organisasi publik akan stagnan dalam menghadapi perubahan; tanpa kepemimpinan transformasional, inovasi akan kehilangan arah dan dukungan moral; dan tanpa pelayanan adaptif, seluruh upaya reformasi birokrasi akan gagal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Husein Al Aziz, Dkk. Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi pada Era Digital Serta Bagaimana Membantu Mengungkapkan dan Menghentikan Korupsi, *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 2025, vol. 4, no.2 : 26
- Agusnur, AnalaPublik, Kebijakan, Vol No, September Hal, and Anala Agusnur. "Inovasi Kebijakan Publik Dalam Penanganan Krisis Pandemi Dan Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2025): 17–25.
- Amallia, Neysa, Zesty Miranda, and M Harviend Gilang Perdana. "Peran Kepemimpinan Transformasional Dalam Reformasi Pelayanan Publik Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 3235–41.
- Di, Kasus, and Kabupaten Subang. "INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL : STUDI." *Jurnal Unsub* 7, no. 1 (2025): 59–65.
- Enza, Resdiana. "KEPEMIMPINAN INOVATIF DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK." *Publik Corner* 11, no. 2 (2016).
- Mayasari Ana, Harjono, Dewi Maha Putri, Sulistyowati Herwin. "INOVASI PELAYANAN PUBLIK; PENGARUH KEWIRAUSAHAAN DAN KEPEMIMPINAN KEWIRAUSAHAAN DALAM REFORMASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 5, no. 1 (2025): 383–98.
- Nuraeni Intan, Taufiqoh Silma, Nurhayati, Gunardi, Permatasari Arini. "Analisis Gaya Kepemimpinan Transformasional Dalam Mendorong Perilaku Inovatif Pegawai Pada Digitalisasi Pelayanan Publik." *Jurnal Manajemen & Bisnis* 1, no. 1 (2025): 13–26.
- Rahim Kurnia Ridwan, Frinaldis Aldri. "TRANSFORMASI BUDAYA DI SEKTOR PUBLIK INDONESIA; MENUJU INOVASI DAN EFISIENSI." *Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi(JUMEA)* 1 (2023): 93–103.
- Sendika May, Frinaldi Aldri. "TRANSFORMASI BUDAYA ORGANISASI DI SEKTOR PUBLIK; INOVASI MENUJU PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH RESPONSIF." *Jurnal Inovasi Pendidikan IPS* 5, no. 2 (2025): 371–80.
- Sudrajat Ajat, Setiawan Awan, Zairusi. "Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sumedang." *JURNAL TATA KELOLA DAN KEBIJAKAN PUBLIK* 1, no. 1 (2025): 60–66.
- Utami, Pri, and Universitas Islam Syekh-yusuf Tangerang. "ARTIKEL TRANSFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK: INOVASI DAN ADAPTASI MENUJU EFISIENSI DAN PELAYANAN PUBLIK." *JURNAL PAPATUNG* 6, no. 2 (2023): 1–9.